



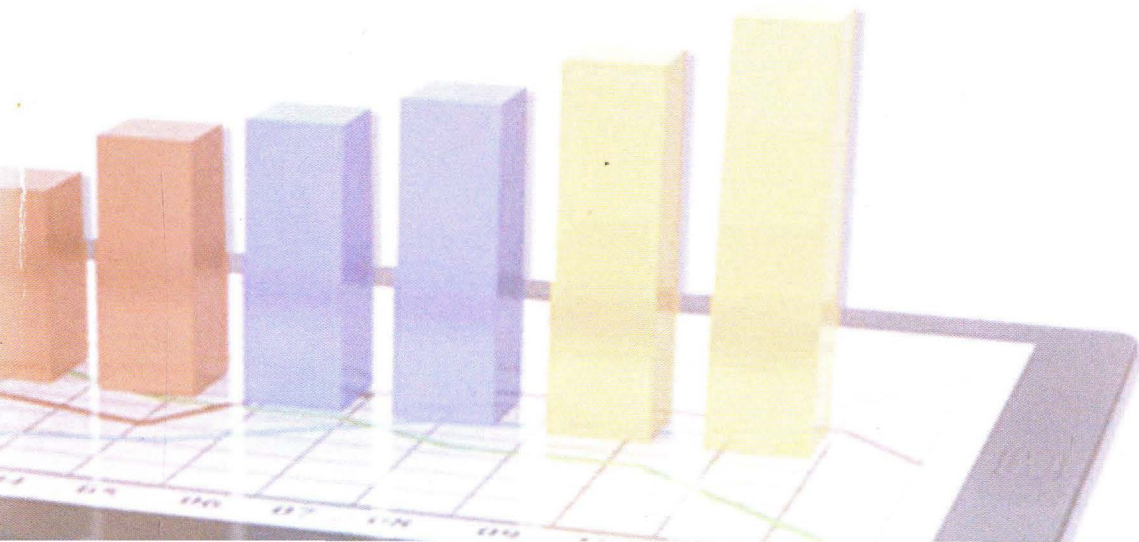
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

2021

MEI

ANALISIS

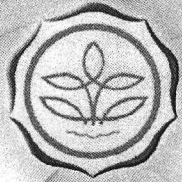
Berita dan Pendapat Masyarakat



Biro Humas dan Informasi Publik

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu
Jaksel 12550 Telp (021) 7806131, Ext. 2303,2308

Email : humas-ip@pertanian.go.id

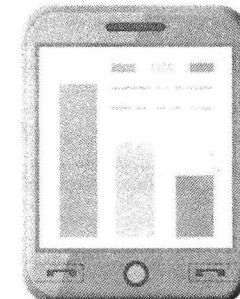


KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

2021

ANALISIS

Berita dan Pendapat Masyarakat



Biro Humas dan Informasi Publik

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta 12550 Telp (021) 7806131, Ext. 2303,2308

Email : humas-ip@pertanian.go.id



PRAKATA

Analisis Berita dan Pendapat Masyarakat disusun sebagai upaya untuk memonitor dan menganalisis isu-isu yang terkait dengan sektor pertanian secara umum, maupun pada Kementerian Pertanian secara khusus. Monitoring dan analisis media cetak dilakukan secara swakelola, sedangkan analisis media elektronik/televisi dilakukan bekerjasama dengan pihak ke tiga. Tujuan penyusunan laporan adalah untuk mengevaluasi dan menyiapkan informasi serta bahan masukan dalam upaya antisipasi dan strategi kehumasan agar isu tidak berkembang menjadi krisis.

Topik yang hangat berkembang bulan ini yaitu Kementerian Pertanian menyatakan tiga hari jelang Idulfitri 2021, ketersediaan dan harga pangan terpantau relatif aman dan terkendali. Ketersediaan 11 komoditas pangan dalam kondisi yang aman dan terkendali. Terkait harga, memang ada dinamika untuk komoditas tertentu, namun masih dalam kondisi yang wajar mengingat momentum Lebaran yang akan segera tiba.

Dengan adanya analisis dari media cetak dan elektronik selama satu bulan, maka diharapkan analisis berita dan pendapat umum ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak di lingkup Kementerian Pertanian.

Jakarta, Mei 2021

**Humas dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian**



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metode Kajian	2
II. ANALISIS MEDIA CETAK	3
2.1. Rekapitulasi Berita	3
2.2. Kategori Nilai Berita	4
III. ANALISIS MEDIA ELEKTRONIK /TELEVISI (TV)	5
3.1. Monitoring Media Televisi	5
3.2. Kategori Nilai Berita di Televisi	6
IV. TOPIK TERSOROT	7
4.1. Topik Tersorot di Media Cetak	7
4.2. Topik Tersorot di Media Elektronik	8



V. TREN ISU TERSOROT	9
5.1. Latar Belakang Isu	9
5.2. Komentar	13
5.3. Tindak Lanjut	16
 LAMPIRAN	 17



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1.	Jumlah ekspos berita pertanian di media televisi Mei 2021	5
Tabel 2.	Topik tersorot di media cetak	7
Tabel 3.	Topik tersorot di media elektronik/Televisi (TV)	8



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, komunikasi dan informasi yang berkembang pesat, maka seiring juga dengan membanjirnya arus informasi baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dengan terbukanya informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat saat ini dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aspek pembangunan. Demikian pun pada aspek pembangunan pertanian.

Pangan sebagai kebutuhan mendasar manusia merupakan isu yang sangat sensitif diberitakan baik oleh masyarakat maupun di berbagai media. Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian, seringkali dipojokkan oleh pemberitaan di media massa. Sehubungan dengan keadaan tersebut, perlu adanya pengawalan terhadap informasi yang berkembang di media serta melakukan analisis terhadap isu yang beredar berlarut-larut di media massa. Hal ini diperlukan terutama dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana suatu isu telah beredar luas di masyarakat.

Dalam menganalisa berita ini tidak hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan pertanian yang telah ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk lebih produktif mengakses informasi baik berita yang bersifat positif maupun negatif dari berbagai referensi dan sumber lain. Demikianpun juga tidak tertutup kemungkinan terhadap terus berkembangnya isu-isu mengenai pembangunan pertanian di berbagai media baik cetak, dan elektronik/televisi. Analisis bulanan ini datanya bersumber dari media massa yang terbit di ibukota dan daerah sebanyak 24 media cetak, dan 17 media elektronik/Televisi.

Melalui kegiatan analisis ini, diharapkan dapat memperoleh informasi berupa uraian suatu isu yang obyektif dari masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan bagi pimpinan Kementerian Pertanian dalam menetapkan kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya.



1.2. Tujuan

- a. Mengetahui nilai berita selama sebulan dari 24 media cetak dan 17 media elektronik/televisi;
- b. Mengetahui isu terhangat dalam sebulan;
- c. Menguraikan top isu dalam periode waktu sebulan, sejauh mana isu berkembang, serta tindak lanjutnya.

1.3. Metode Kajian

Kegiatan Analisa Berita dan Pendapat Masyarakat merupakan suatu kajian atas sebuah isu yang hangat setiap bulannya. Objek kajian dalam kegiatan ini adalah berita-berita terkait isu yang termuat dalam kliping berita dan pendapat pertanian dari media cetak serta hasil monitoring media elektronik/televisi.

Kegiatan dilaksanakan dengan urutan prosedur:

- Merumuskan nilai berita berdasarkan berita dan pendapat di media massa yang terkait dengan Kementerian Pertanian;
- Merumuskan permasalahan berdasarkan berita-berita ataupun pendapat yang terkait dengan isu;
- Mengumpulkan pernyataan-pernyataan terkait isu yang muncul di media massa;
- Merumuskan tindak lanjut berdasarkan solusi permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan maupun stakeholder melalui media massa;
- Menggandakan, menjilid dan mendistribusikan kepada jajaran pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dan pihak lain yang membutuhkan informasi.

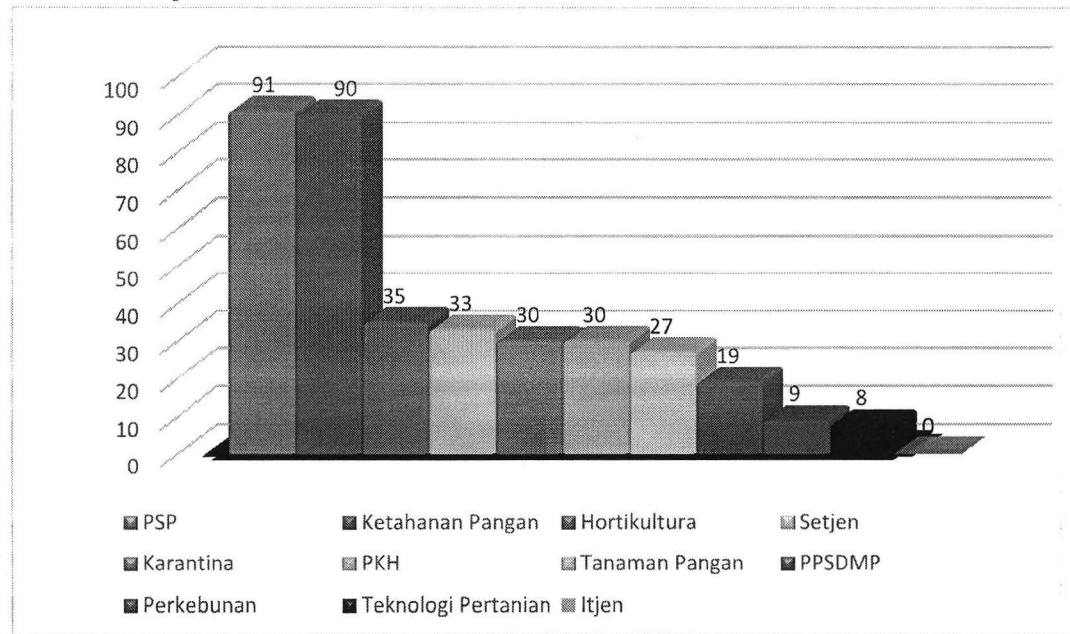


II. ANALISIS MEDIA CETAK

2.1. Rekapitulasi Berita

Selama periode 1 – 31 Mei 2021 terdapat sebanyak 372 berita terkait sektor pertanian, yang diambil dari sumber 27 media cetak dengan rincian sebagaimana tersaji pada Grafik 1.¹ Dari data tersebut, terlihat 3 (tiga) subsektor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan, yaitu:

1. **Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 91 berita.**
2. **Ketahanan Pangan sebanyak 90 berita.**
3. **Hortikultura sebanyak 35 berita.**



Grafik 1. Rekapitulasi Berita Terkait dengan Sektor Pertanian

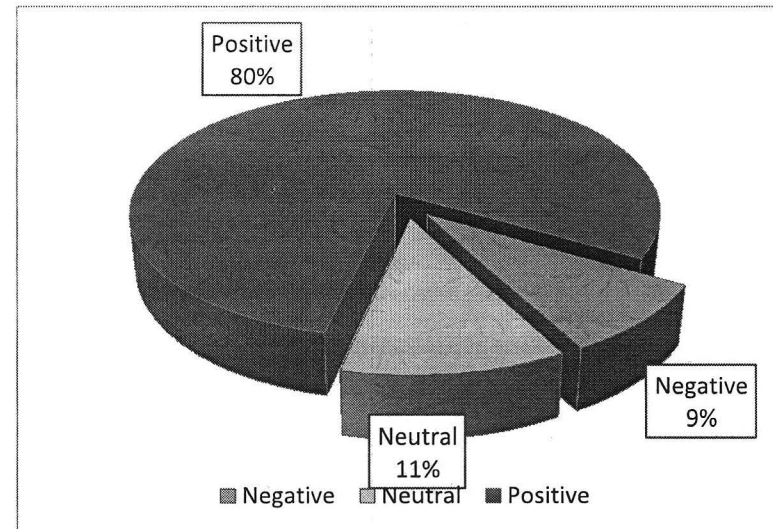
¹ Sumber: Kliping Berita Pertanian yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 2021

2.2 Kategori Nilai Berita Media Cetak

Selain pengelompokan berdasarkan subyek, pemberitaan di media cetak pada periode tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori positif, negatif, dan netral. Pemberitaan digolongkan menjadi kategori positif jika judul dan isi berita dapat memberikan pencitraan positif bagi Kementerian Pertanian dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sektor pertanian. Sedangkan pemberitaan dikategorikan negatif jika memberikan pencitraan yang sebaliknya dan netral jika pemberitaan berimbang atau tidak bersentimen secara khusus terhadap Kementerian Pertanian.

Berdasarkan penggolongan dimaksud, dari sejumlah berita dan opini di media cetak selama periode 1 – 31 Mei 2021 di atas, terdapat 3 kategori nilai berita (sentimen) sebagaimana tersaji dalam Grafik 2;

1. Berita bernilai positif sebanyak 297 atau 80%.
2. Berita bernilai negatif sebanyak 33 atau 9%.
3. Berita bernilai netral sebanyak 42 atau 11%.



Grafik 2. Kategori Nilai Berita di Media Cetak



III. ANALISIS MEDIA ELEKTRONIK /TELEVISI (TV)

3.1. Monitoring Media Televisi

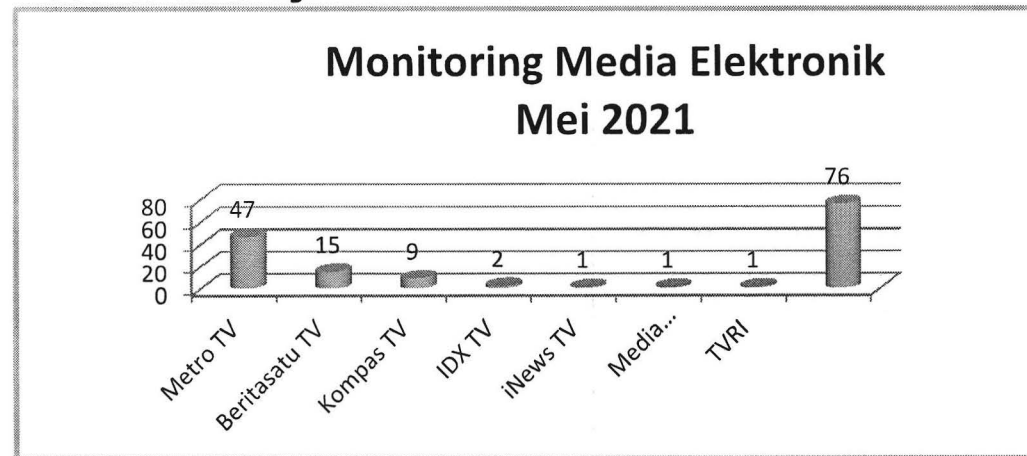
Hasil monitoring berita pertanian di media elektronik TV selama bulan Mei 2021, yang proses untuk mendapatkan informasi dan berita dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah ekspos berita pertanian di media televisi Mei 2021

No	Stasiun	Jumlah Ekspos
1	Metro TV	47
2	Beritasatu TV	15
3	Kompas TV	9
4	IDX TV	2
5	iNews TV	1
6	Media Indonesia	1
7	TVRI	1
		76

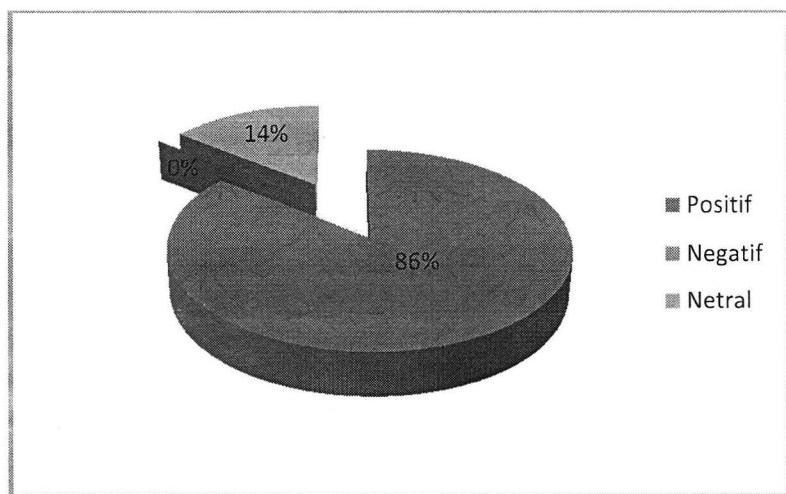
- Kegiatan monitoring pemberitaan di media elektronik (Televisi/TV) telah dilakukan di 7 stasiun TV. Selama bulan Mei 2021, sejumlah 76 ekspos pemberitaan.
- Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah ekspos terbesar berita pertanian terdapat di stasiun Metro TV (47). Hal ini dikarenakan, banyaknya pemberitaan pada berbagai acara yang ditayangkan di stasiun tersebut. Sedangkan pemberitaan terbanyak selanjutnya adalah di Berita Satu (15).

Grafik 3. Monitoring Pemberitaan Kementerian Pertanian di 7 Stasiun TV



3.2. Kategori Nilai Berita di Televisi

Paparan rinci dari media televisi seputar isu pertanian akan dijabarkan dalam bentuk diagram kecenderungan isu. Ada tiga jenis kecenderungan pada tiap isu, yaitu kecenderungan positif, kecenderungan negatif, dan netral. Kecenderungan positif ialah isi dari isu yang dikabarkan tidak menyangkut cerita keburukan, namun sebaliknya memaparkan hal yang baik, dari maupun terhadap Kementerian Pertanian atau pemangku kepentingan. Kecenderungan negatif ialah isu mengabarkan tentang hal-hal yang buruk maupun yang berakibat buruk bagi Kementerian Pertanian atau *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kemudian isu yang netral ialah paparan yang tidak mengabarkan keburukan atau kebaikan atas pihak yang berkepentingan atau berita yang berimbang antara berita yang positif dan negatif, terkait bagi Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan.



Berdasarkan penggolongan dimaksud, dari 76 jumlah ekspos di 7 media televisi, maka dapat digolongkan sesuai kecenderungan isunya, sebagaimana tersaji pada gambar 3, yaitu terdapat 76 berita berkategori positif (100%).

Grafik 4. Kategori Nilai Berita di Televisi



IV. TOPIK TERSOROT

4.1. Topik Tersorot di Media Cetak

Berdasarkan data yang telah dianalisis di media cetak, maka dapat dilihat beberapa isu utama yang tersorot selama bulan Mei 2021, antara lain seperti dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Topik Tersorot di Media Cetak

NILAI BERITA	SUBSEKTOR	TEMA BERITA
Positif (+)	1. Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">• Ketahanan Pangan Nasional• Rencana Pembentukan Holding BUMN Pangan• Antisipasi Kelangkaan Tahu dan Tempe• Layanan Gratis Ongkir Pasar Mitra Tani
	2. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Stok dan Alokasi Pupuk Bersubsidi• Penyaluran Bantuan Alsintan• Pengembangan Program Food Estate
	3. Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none">• Dorong Korporasi Sektor Pertanian• Pengembangan Program Food Estate
Negatif (-)	1. Hortikultura	<ul style="list-style-type: none">• Aksi Mogok Pedagang Tahu Tuntut Stabilisasi Harga Kedelai
Netral (N)	1. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Lahan Pertanian Terdampak Banjir• Lahan Pertanian Terdampak Hama• Lahan Pertanian Terdampak Kemarau
	2. Peterakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none">• Polemik Impor Daging
	3. Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">• Polemik Serapan Beras Bulog• Kenaikan Harga Cabai dan Daging



4.2. Topik Tersorot di Media Elektronik

Berdasarkan data yang didapat dari media elektronik televisi, maka beberapa topik utama yang tersorot pada bulan Mei 2021 antara lain sebagai berikut dalam Tabel 3.

Tabel 3. Topik tersorot di media elektronik/Televisi (TV)

NILAI BERITA	SUBSEKTOR	ISU	STASIUN
Positif (+)	1. Badan Karantina Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Upaya Dorong Peningkatan Ekspor Pertanian 	IDX TV, Metro TV, Beritasatu TV, Kompas TV
	2. Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Food Summit 2021 	Metro TV
		<ul style="list-style-type: none"> Stok dan Pasokan Pangan Aman 	Metro TV, Beritasatu TV
		<ul style="list-style-type: none"> Upaya Wujudkan Ketahanan Pangan 	Metro TV
	3. BPPSDMP	<ul style="list-style-type: none"> Dorong Optimalisasi Asuransi Pertanian 	Metro TV, Beritasatu TV
	4. Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> Dorong Korporasi Sektor Pertanian 	Beritasatu TV, TVRI
	5. Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Tata Kelola Industri Daging 	Metro TV, Beritasatu TV, Kompas TV
6. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Inovasi Pertanian 	Metro TV, Beritasatu TV	
7. Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Kementan Dorong Pangan Lokal Masuk Perhotelan 	Metro TV, Kompas TV	

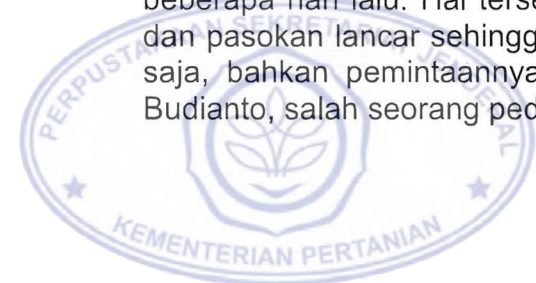
V. TREN ISU TERSOROT

Ketahanan Pangan Nasional

5.1 Latar Belakang Isu

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan pengawasan terpadu di Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia jelang Idul Fitri 1442 H. Pengawasan yang dilakukan ini guna memastikan keamanan dan ketersediaan stok daging. Selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran, Kementan melakukan pengawasan terpadu untuk memastikan ketersediaan stok produk pangan asal hewan strategis seperti daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Kegiatan pengawasan terpadu yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabek ini dilakukan pada tanggal 19 April 2021 hingga H-3 Idul Fitri 1442 H. Selain di tingkat pusat, pengawasan terpadu juga dilaksanakan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini juga mengacu pada imbauan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4586/SE/PK.350/04/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Menjelang dan/atau pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021. Dalam SE itu pemda sebagai penyelenggara fungsi peternakan dan kesehatan hewan dapat mengoptimalkan upaya penjaminan keamanan dan ketersediaan produk hewan.

Kementerian Pertanian menyatakan tiga hari jelang Idulfitri 2021, ketersediaan dan harga pangan terpantau relatif aman dan terkendali. Ketersediaan 11 komoditas pangan dalam kondisi yang aman dan terkendali. Terkait harga, memang ada dinamika untuk komoditas tertentu, namun masih dalam kondisi yang wajar mengingat momentum Lebaran yang akan segera tiba. Dari pemantauan Kementan di Pasar Kemiri Depok, didapati penurunan permintaan dibanding beberapa hari lalu. Hal tersebut disampaikan oleh pedagang, pada tahun ini permintaan masyarakat tidak terlalu besar dan pasokan lancar sehingga harga pangan cenderung stabil. Kalau harga beras disini tidak ada kenaikan. Biasa-biasa saja, bahkan pemintaannya cenderung terus berkurang, karena pemerintah juga membagikan bantuan beras," ujar Budiarto, salah seorang pedagang beras di Pasar Kemiri Depok yang sudah berjualan 10 tahunan.



Pemerintah berencana mengimpor 1 juta beras pada tahun ini. Rinciannya, 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Ini disampaikan Menteri Koordinator Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto awal Maret lalu. Alasannya, untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. "Nah, kemudian pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 (juta ton). Kemudian juga pengadaan daging dan penyediaan gula, baik itu untuk konsumsi maupun industri. Di mana tentu menghadapi lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga itu betul-betul tersedia untuk masyarakat," kata Airlangga dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, (4/3/2021).

Rencana pemerintah mengimpor 1 ton beras pada tahun ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Pakar pertanian menyebut, kebijakan ini tidak masuk akal. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini kebijakan yang tidak bijak jelas produksi tahun 2021 ini pasti meningkat, harga-gabah di tingkat petani terus mengalami penurunan. Tahun 2019 saja yang produksinya lebih rendah, enggak impor, 2020 lebih rendah lagi dibanding 2021 ini enggak impor,

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) juga mengatakan, keputusan impor beras akan menyakiti hati para petani. Pasalnya, harga gabah di tingkat petani terus menurun sejak akhir tahun lalu. "Nah, yang kasihan petani, harga gabah di tingkat petani itu terus mengalami penurunan. Bulan September itu 4.800, ini yang hasil survei AB2TI. Lalu di bulan Desember, yang harusnya terus meningkat sejak September ya, itu malah turun ke 4.263, Februari turun di bawah 4.000, di 3.995. Lalu sekarang ini kami dapat laporan dari seluruh jaringan tani kami, itu harga sudah di bawah 3.800, ada yang 3.400, 3.500, kasihan petani kalau seperti itu. "Logikanya di mana, kalau mau menjaga stok beras, kenapa kok enggak melalui serapan dalam negeri, gimana sih, wong dalam negeri saja harga jatuh seperti ini, kenapa kok enggak nyerap dalam negeri, selesai sudah persoalan kalau nyerap dalam negeri. Sehingga untuk itu kenapa kok justru serapan bulog 2021 ini enggak ditingkatkan saja. Serapan Bulog itu 1,4 juta ton itu kayak enggak kerja saja itu 1,4 juta ton. Kan harusnya bisa ditingkatkan sampai 2,5 juta ton. Kalau ditingkatkan menjadi 2,5 juta ton kan semua terpenuhi. Kebutuhan Bulog untuk berbagai hal kan, stok pemerintah yang rencana 500 ribu terpenuhi. Terpenuhi dalam 1, 2, 3 bulan ini

Anggota Komisi IV DPR RI Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk meningkatkan sinergitas kerjanya dengan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan). Sinergitas ini penting dilakukan agar kebutuhan dan stok beras nasional tetap dalam kondisi aman dan terkendali. Apalagi, kebutuhan beras nasional tidak perlu impor, karena dapat tercukupi dari produksi dalam negeri. “Maka dari itu kami meminta panen petani dapat terserap dengan harga yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga semangat petani untuk terus bisa memproduksi dengan baik. Disisi lain, bahwa wacana impor beras yang kini terus bergulir betul–betul sangat meresahkan petani, khususnya yang ada di ladang dan sawah pedesaan. Padahal dalam waktu dekat Indonesia akan melakukan panen raya beras. Bulan sekarang sampai Mei Indonesia dihadapkan pada panen raya dan kalau sampai impor terjadi akan sangat merugikan petani.

Rencana impor beras harus didasarkan pada data. Sementara, BPS telah menyatakan stok pangan dalam negeri masih aman. “Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang–Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan bahwa ketersediaan beras cukup, bahkan sektor pertanian satu–satunya yang tumbuh selama pandemic. Menjadi tidak rasional, kata dia, jika wacana itu justru digulirkan jelang musim panen. Artinya, yang terjadi bukan masalah komunikasi, melainkan abai dari data BPS. Sementara Presiden Jokowi berulang kali mengatakan, data yang digunakan adalah data BPS. Pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi–asumsi. “Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal. Mestinya kalau memang pemerintah mau menyelesaikan problem harga, harus ada efisiensi di pertanian, bukan dengan cara impor.

Bulog mengaku masih memiliki cadangan pangan. Dan jika impor benar–benar teralisasi, Bulog sepertinya akan kesulitan menyalurkan. Terhadap hal ini, DPR mempertanyakan ada apa di balik niatan impor beras. Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga seharusnya bertanggung jawab atas produksi beras lokal. Ketika produksi dalam negeri mencukupi, maka kebijakan impor bisa diminimalisir. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyebut, Dalam Rapat Dengar Pendapat, Perum Bulog menyatakan, bahwa pihaknya tidak akan melakukan impor satu juta ton beras. Dijelaskan bahwa Bulog menyatakan bahwa ketersediaan pangan nasional masih mencukupi. Yang ditugaskan Bulog. Kalau Bulog sudah yakin stok cukup, ya tinggal lapor kepada pemerintah tidak usah impor. Oleh



karena itu, seharusnya Bulog langsung melakukan komunikasi dan koordinasi. "Kalau stok sudah cukup, pemerintah juga akan mendengarkan dan tidak usah impor.

Bulog menyatakan mengutamakan menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton. "Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP. Hingga hari ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia. Bahkan menurut Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia. "Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya.



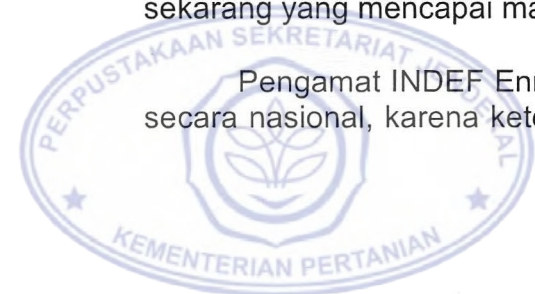
5.2 Komentar

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyebut, dalam Rapat Dengar Pendapat, Perum Bulog menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan impor satu juta ton beras. Dijelaskan bahwa Bulog menyatakan bahwa ketersediaan pangan nasional masih mencukupi. "Kan yang ditugaskan Bulog. Kalau Bulog sudah yakin stok cukup, ya tinggal lapor kepada pemerintah tidak usah impor," kata Firman kepada wartawan, Selasa (15/3). Oleh karena itu, seharusnya Bulog langsung melakukan komunikasi dan koordinasi. "Kalau stok sudah cukup, pemerintah juga akan mendengarkan dan tidak usah impor," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menolak keras rencana pemerintah impor beras 1 juta ton. Bagi Johan, kebijakan impor ini bertentangan dengan konstitusi. "Sebagai awal, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersepakat bahwa impor beras ketika panen raya adalah pengkhianatan terhadap konstitusi," tegas Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama para pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) dan BUMN Pangan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/3). Johan mengingatkan, dasar terbentuknya pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi bertujuan melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Karena itu, dia bertanya-tanya, pemerintah hendak melindungi siapa dengan mendatangkan beras dalam jumlah sangat besar masuk ke Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan pihaknya akan mengutamakan menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton. "Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Dia menegaskan hingga hari ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia. Bahkan, menurut Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia. "Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya," tegas Budi Waseso.

Pengamat INDEF Enny Sri Hartati meminta pemerintah menghitung kembali atau melihat stok beras dalam negeri secara nasional, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog. "Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok

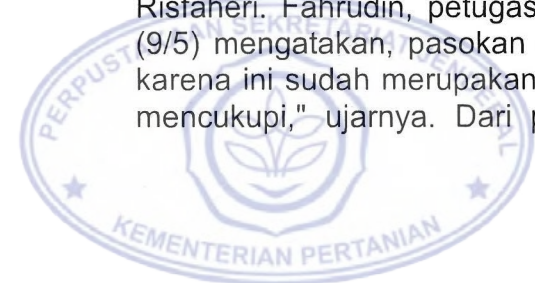


nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup," jelasnya. Dia menambahkan untuk menyelesaikan masalah harga beras, pemerintah harus melakukan efisiensi di sektor pertanian, seperti mengatasi persoalan subsidi pupuk dan benih, bukan dengan cara praktis seperti impor. Enny menjelaskannya selama ini masalah stok di Indonesia adalah persoalan distribusi produk pertanian karena beberapa daerah menjadi lumbung padi, sedangkan daerah lain tidak menghasilkan. "Di Indonesia, khususnya beras, harga tidak menjadi satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian memperkirakan ketersediaan stok beras di dalam negeri, hingga akhir Mei 2021 mencapai 24 juta ton. Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono mengatakan kebutuhan beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 12 juta ton. "Khususnya beras, pada saat ini dalam kondisi aman. Karena petani memasuki masa panen raya. Neraca beras sampai akhir Mei 2021, diperkirakan surplus 12,56 juta ton beras. Komoditas lainnya juga dapat dibeli dari produksi dalam negeri," ujar Momon dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi yang Membidangi Pertanian DPR RI di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (15/3/2021). Sekjen Kementan Momon Rusmono mengatakan 24 juta ton, berasal dari stok akhir Desember 2020 yakni 7 juta ton, dan perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17 juta ton. Sama seperti beras, komoditas pangan lainnya juga mengalami surplus seperti jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan di Daerah, agar terus melaporkan ketersediaan dan harga pangan di daerahnya. "Kalau ada kekurangan stok atau gejolak harga tinggi, tentu pemerintah akan melakukan intervensi agar harga bisa stabil dan tidak memberatkan masyarakat," ujar Agung dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Tiga hari jelang lebaran Idulfitri 2021 ketersediaan dan harga pangan terpantau relatif aman dan terkendali. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Risfaheri di Jakarta, Minggu (9/5). "Kami pastikan ketersediaan 11 komoditas pangan dalam kondisi yang aman dan terkendali. Terkait harga, memang ada dinamika untuk komoditas tertentu, namun masih dalam kondisi yang wajar mengingat momentum lebaran yang akan segera tiba," ujar Risfaheri. Fahrudin, petugas pemantau ketersediaan dan harga pangan yang ditemui di Pasar Kemiri Depok, Minggu (9/5) mengatakan, pasokan dan harga relatif tidak ada masalah, "Kalau stok dan harga disini relatif aman dan stabil, karena ini sudah merupakan kegiatan tahunan, sehingga pemerintah pusat dan daerah sudah mengantisipasi agar stok mencukupi," ujarnya. Dari pemantauan tersebut didapati penurunan permintaan dibanding beberapa hari lalu. Hal



tersebut disampaikan oleh pedagang, bahwa pada tahun ini permintaan masyarakat tidak terlalu besar dan pasokan lancar sehingga harga pangan cenderung stabil.

Dinas Pangan Aceh memastikan stok komoditas pangan di pasar cukup menjelang hari raya Idul Fitri 1442 hijriah, sehingga masyarakat provinsi ujung barat Indonesia itu diminta tidak perlu khawatir kelangkaan bahan pokok. “Stok bahan pokok di pasar menjelang lebaran Idul Fitri ini masih aman, harga stabil, kita selalu memonitor itu,” kata Kepala Dinas Pangan Aceh Cut Yusminar di Banda Aceh, Senin. Cut Yusminar menjelaskan sembilan bahan pokok utama seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, bawang merah dan beberapa lainnya masih cukup tersedia di pasar serta distributor, dan harganya juga stabil. Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Aceh juga telah meninjau langsung ke lapangan untuk mengecek stok bahan pokok, memantau perkembangan harga serta memastikan agar tidak ada pedagang yang melakukan penimbunan jelang lebaran. “Hingga saat ini tidak ada penimbunan. Kami bersama Satgas Pangan dan Polda Aceh sudah cek ke lapanga. Hanya saja ada distributor yang sudah mulai stok untuk hari raya, dan enggak masalah,” katanya. Apabila sewaktu-waktu terjadi kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga naik maka pemerintah langsung mengantisipasi dengan cara memasok dari Sumatera Utara, agar stok cukup dan harga stabil.



5.3 Tindak Lanjut

Pemerintah harus jeli melihat stok, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog. "Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup. Masalah stok di Indonesia adalah masalah distribusi produk pertanian. Beberapa daerah menjadi lumbung padi, sementara daerah lain tidak menghasilkan. "Secara natural, harga dipengaruhi demand and supply. Tapi di Indonesia, khususnya beras, harga tidak satu–satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak–pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan

Pemerintah bisa lebih serius memastikan ketersediaan pangan dalam negeri. Apalagi data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi kenaikan produktivitas beras pada periode Januari hingga April ini. Untuk itu, dia meminta Kementan agar data–data tersebut bisa digunakan untuk meyakinkan kementerian/lembaga lainnya bahwa ketersediaan beras cukup, sehingga tidak perlu impor. "Jangan sampai ketika kami tanya (Kementan) kenapa impor, jawabannya ya hasil Rakortas (rapat koordinasi terbatas). Bapak harus bisa meyakinkan Mendag, Menko Perekonomian sebagaimana Anda meyakinkan kami di Komisi IV bahwa prognosa pangan kita dalam posisi yang bagus. Jadi jangan hanya kami yang diyakinkan

Kementan melakukan berbagai upaya untuk memperlancar distribusi pangan, dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, antara lain melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dan menggencarkan gelar pangan murah oleh Pasar Mitra Tani di seluruh Indonesia.



Lampiran



Dinas Pertanian Gorontalo Awasi Produk Pangan Asal Hewani

Selasa, 11 Mei 2021 | 15:07 WIB | Penulis

MC PROV GORONTALO

, Redaktur Kusnadi



Kota Gorontalo, InfoPublik - Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo memastikan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk Pangan Asal Hewani (PAH).

“Dinas Pertanian secara rutin melakukan pemantauan terhadap distribusi/peredaran produk tersebut untuk memastikan pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga tercipta keamanan dan ketentraman batin masyarakat,” kata Muljady D Mario Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Selasa (11/5/2021).



Menurut Muljady D Mario, pemantauan dan pengawasan ini juga mengacu pada imbauan dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 4586/SE/PK.350/04/2021 tanggal 6 April 2021 tentang penjaminan penyediaan produk hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) menjelang dan/atau pada Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442 H.

“Pegawasan ini untuk mengantisipasi setiap kemungkinan potensi praktik penyimpangan dan pemalsuan produk hewan di sepanjang rantai produksi produk hewan,” ujar Muljady D Mario.

Selain itu, pengawasan ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan upaya pencegahan risiko kontaminasi Covid-19 pada pangan asal hewan dan penularan pada personil di unit usaha produk hewan (produksi dan distribusi) melalui penguatan higiene dan sanitasi, penggunaan alat pelindung diri dan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi produk hewan.

Dinas Pertanian senantiasa berkomitmen untuk melakukan pengawasan berkala terhadap unit usaha dan produk hewan yang beredar di wilayah sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi segala potensi yang memungkinkan terjadinya instabilitas supply dan harga produk hewan.

“Dinas Pertanian juga senantiasa memonitor distribusi lalu-lintas pemasukan dan pengeluaran produk hewan di wilayah Gorontalo, agar dapat terjaminnya kebutuhan pasokan sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat menjelang Idulfitri 1442 H,” tutur Muljady D Mario.

Hal ini dimaksudkan juga untuk mendorong upaya edukasi masyarakat untuk peningkatan konsumsi protein hewani, dan memastikan kecukupan serta stabilitas pasokan kebutuhan pangan asal hewan di Gorontalo. (MCGorontaloProv/Oman/Rosyid)



Geliat Pasar Mitra Tani Daerah Topang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

May 11, 2021



Top Ad

INIPASTI.COM, Jakarta – Stabilitas pasokan dan harga pangan jelang lebaran menjadi perhatian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Mentan Syahrul menegaskan akan terus berupaya menjaga agar ketersediaan pangan cukup, pasokan dan harga pangan aman dan terkendali.

Melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian mengembangkan Pasar Mitra Tani (PMT) atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai salah satu instrumen dalam upaya mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan. Dengan menghadirkan pangan yang murah dan berkualitas, PMT/TTIC di berbagai daerah di seluruh Indonesia serempak melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM).



“Kita terus mendorong GPM di seluruh provinsi agar masyarakat mendapat pangan yang murah dan berkualitas, masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan pangan di PMT/TTIC cukup untuk menghadapi lebaran,” terang Risfaheri, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, di Jakarta Selasa (11/05/2021).

Tercatat PMT/TTIC yang ada di seluruh Ibukota provinsi, bahkan termasuk yang di Kabupaten/Kota melakukan GPM hingga h-1 lebaran. Beberapa PMT/TTIC mengalami peningkatan kunjungan hingga 100 persen seperti yang ada di PMT Sumatera Barat. Hal ini wajar mengingat kebutuhan pangan jelang Idulfitri meningkat. Selain itu komoditas pangan di PMT/TTIC yang lebih fresh dan harga lebih murah.

Baca Juga: [Optimalisasi Pertanian, Mentan Dorong Anak Muda Manfaatkan Peluang di Era Modern](#)

GPM yang dilakukan PMT/TTIC Sumbar melayani offline maupun online dengan pengantaran gratis ke tujuan pemesan. PMT Sumbar juga membuat paket-paket sembako yang banyak diminati Organisasi Perangkat Daerah, Dharma Wanita, maupun masyarakat umum,

“Paket sembako dari PMT/TTIC ini diminati masyarakat karena banyak diperuntukan sebagai bantuan sosial ke masyarakat kurang mampu maupun instansi yang membutuhkan.” ujar Kepala Dinas Pangan Sumbar Effendi.

Situasi yang sama terjadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat yang menggelar GPM hingga 11 Mei 2021 di halaman kantor DKPP Jabar Jalan Ir .H Juanda Kota Bandung.

Terdapat 11 bahan pokok yang dijual dengan harga di bawah harga pasar, antara lain beras segar 9 ribu rupiah per kilogram, daging ayam 35 ribu rupiah per kilogram, daging sapi 95 ribu rupiah per kilogram, serta telur ayam 21 ribu lima ratus rupiah per kilogram.

Baca Juga: [Masa Pandemi, Kinerja Sektor Pertanian Cemerlang](#)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Jabar Jafar Ismail mengatakan GPM ini menjadi salah satu upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menyusul meningkatnya permintaan bahan pangan jelang Idulfitri.

“GPM ini kita lakukan sebagai langkah aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau atau lebih murah dibanding harga pasaran” ujar Jafar.



Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Fitriani. Dia berharap dengan adanya GPM yang dilaksanakan oleh PMT/TTIC Sulsel dapat membantu masyarakat mendapat bahan pangan yang lebih murah.

Tersedianya bahan pangan yang murah ini dikarenakan sebagian besar pangan yang dijual dipasok langsung oleh petani atau gapoktan atau diatributot yang bermitra dengan PMT/TTIC Makassar.

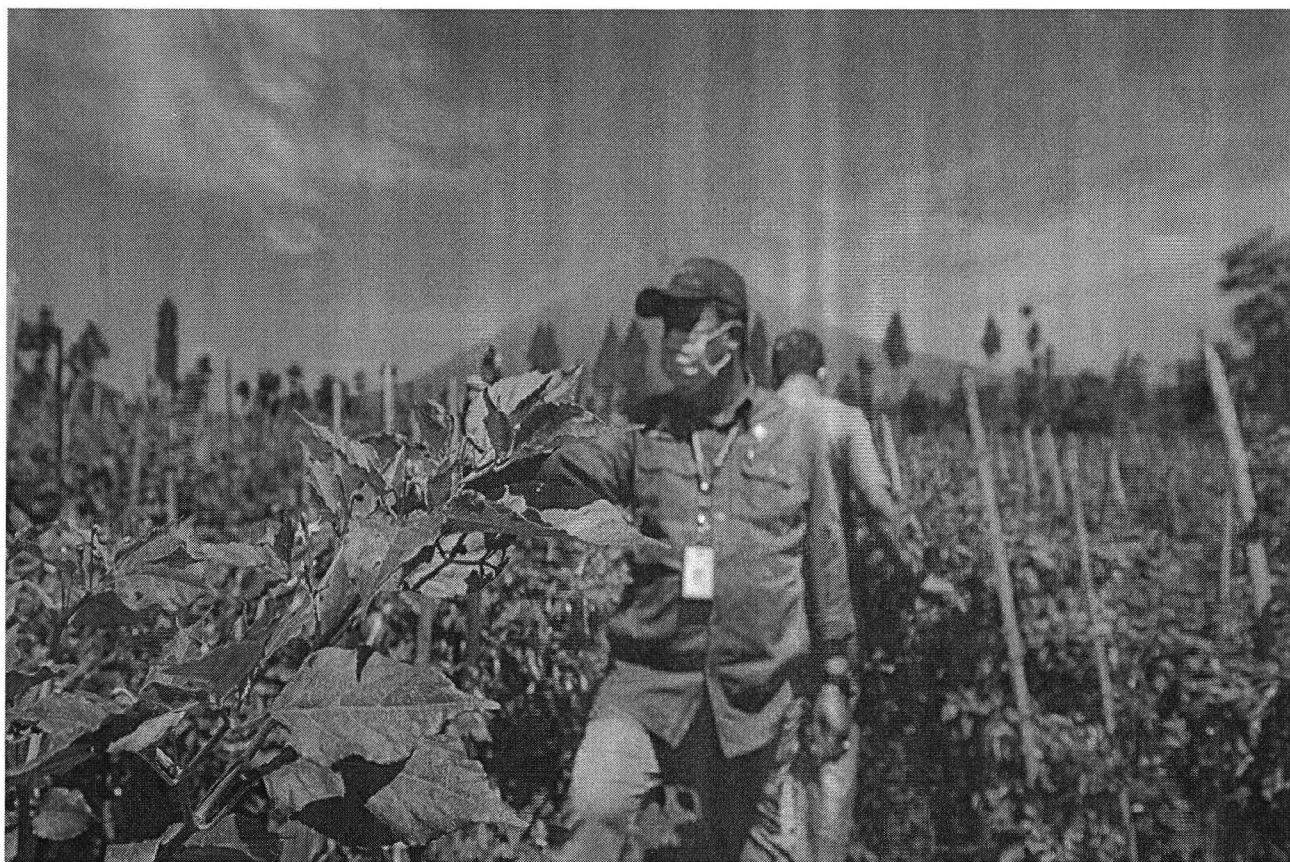
Kondisi yang nyaris sama juga terpantau di PMT/TTIC Propinsi Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, bahkan diujung timur Papua dan Papua Barat seakan berlomba-lomba mengamankan stabilitas pasoka dan harga pangan untuk menghaaldapi lebaran yang tinggal hitungan hari.



Jamin Stok Aman, Kementan Pantau Langsung Panen Cabai

Selasa 11 May 2021 12:09 WIB

Red: Ichsan Emerald Alamsyah



Kementerian Pertanian turun langsung ke lapangan memantau kondisi daerah sentra pemasok cabai Jabodetabek, di antaranya Kabupaten Temanggung. Di Kecamatan Ngadirejo, tepatnya Desa Campursari terhampar cabai seluas 120 ha dan Desa Kataan seluas 250 ha yang mayoritas sedang panen. Jika ditotal, satu Kecamatan Ngadirejo saat ini ada pertanaman cabai rawit seluas 450 hektar, cabai keriting 30 hektar, dan cabai besar 250 hektar.

Foto: Kementan

Kementan optimistis bahwa pasokan cabai mencukupi kebutuhan Idul Fitri

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Jelang Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tegaskan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan stok pangan mencukupi kebutuhan konsumen. Terlebih dengan adanya kebijakan larangan mudik, sehingga



khususnya di Jabodetabek harus benar-benar dipastikan pasokan aman dan harga terkendali.

Kementerian Pertanian turun langsung ke lapangan memantau kondisi daerah sentra pemasok cabai Jabodetabek, di antaranya Kabupaten Temanggung. Di Kecamatan Ngadirejo, tepatnya Desa Campursari terhampar cabai seluas 120 ha dan Desa Kataan seluas 250 ha yang mayoritas sedang panen. Jika ditotal, satu Kecamatan Ngadirejo saat ini ada pertanaman cabai rawit seluas 450 hektar, cabai keriting 30 hektar, dan cabai besar 250 hektar.

Melihat kondisi tersebut, Kementan optimistis bahwa pasokan cabai mencukupi kebutuhan Idul Fitri yang jatuh di hari Kamis mendatang. "Jika melihat kondisi di wilayah sentra seperti ini, Saya rasa tidak akan terjadi lonjakan harga cabai, paling terjadi distorsi harga, itu pun karena suasana lebaran, supir angkutan, pedagang dan juga petani tentunya merayakan Idul Fitri bersama keluarga, setelah itu harga tetap aman," ujar Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto.

Secara nasional, jika dilihat dari data prognosa produksi, yang dihitung berdasarkan realisasi luas tambah tanam bulan November 2020 s.d Februari 2021, produksi cabai rawit bulan Mei sebesar 101.132 ton sedangkan kebutuhan hanya 76.726 ton sehingga masih surplus sebesar 24.407 ton. Begitu juga dengan cabai besar, prognosa produksi sebesar 97.456 ton sedangkan kebutuhan 79.711 ton sehingga surplus sebesar 17.754 ton.

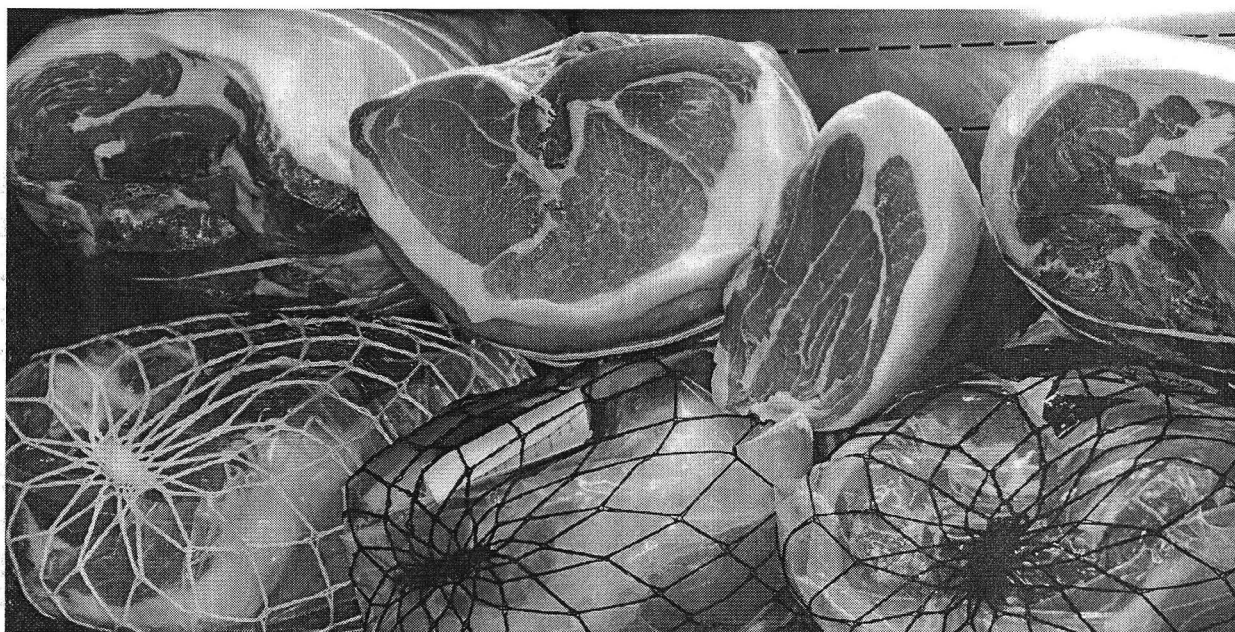
Di sela-sela kunjungan lapangnya Anton juga menyampaikan apresiasinya kepada petani Temanggung yang sudah menerapkan likat kuning dan perangkat alat buah di pertanaman cabai. "Jadi gini, alat buah itu yang paling ditakuti tanaman hortikultura, jadi dengan adanya petrogenol ini tentunya sangat efektif untuk menangkal serangan hama, jadi saya sarankan kepada petani di daerah lain juga menggunakan ini", pungkasnya.



Jelang Idul Fitri, Harga Cabai hingga Daging Sapi di Pasaran Alami Kenaikan

M.A.Maulidin

- 11 Mei 2021, 22:10 WIB



Ilustrasi daging sapi. /Pixabay

PR DEPOK - Panel Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat harga cabai dan harga daging yang mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri.

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, harga cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, dan daging ayam terpantau naik bila dibandingkan dengan minggu lalu.

Harga cabai merah keriting mencapai Rp40.139 per kg pada 10 Mei 2021 atau naik dibandingkan 4 Mei 2021 dari harga Rp36.914 per kg.

Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp63.652 per kg dibandingkan pekan lalu seharga Rp61.247 per kg.

Untuk harga daging sapi rerata secara nasional naik menjadi Rp129.861 per kg ketimbang pekan lalu seharga Rp125.574 per kg.



Harga daging ayam naik menjadi Rp37.272 per kg dibandingkan pekan sebelumnya yang berkisar di harga Rp36.506 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada produk pangan lainnya seperti beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng.

Meski begitu, BKP Kementan menyebut harga pangan pokok bagi konsumen yang stabil sepanjang akhir April 2021 sampai awal Mei 2021 .

Harga meroket mulai 7 Mei hingga hari ini yang diperkirakan naik sampai Hari Raya Idul Fitri nanti.

Menindaklanjuti kenaikan harga, pemerintah menggelar Pangan Murah yang diprakarsai oleh Pasar Mitra Tani Kementan hingga jelang hari raya.

Pasar Mitra Tani memberikan fasilitas belanja daring gratis ongkir di berbagai aplikasi seperti GrabMart, PasTani, BukaLapak, dan GoFood.

BUMN pangan Perum Bulog juga menyediakan berbagai pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar seperti daging, beras, dan minyak goreng .

Bulog menjual daging kerbau dan daging sapi beku di toko resmi iPanganandotcom dan Shopee dengan harga lebih rendah dengan ongkos kirim cuma-cuma untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.***



Pastikan Pangan Aman, Dinas Ketahanan Pangan Imbau Petani Harus Miliki Izin Edar Dari OKKPD

Selasa, 11 Mei 2021 | 18:17 WIB | Penulis
MC Prov. Kalimantan Selatan
, Redaktur Tobari



Banjarbaru, InfoPublik - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Suparno mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pangan segar yang akan dikonsumsi masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya seperti pestisida.



"Diharapkan pasca panen petani jangan menaburkan pestisida karena akan membuat hasil panen yang tidak sesuai aturan. Apalagi kalau dikonsumsi masyarakat sangat berbahaya," kata Suparno, Banjarbaru, Selasa (11/5/2021).

Oleh karena itu, Dinas Ketapang Kalsel mengimbau agar semua produk petani dapat teregistrasi izin edar yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Registrasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

Izin edar pendaftaran PSAT ini dapat diperoleh petani apabila mendaftarkan produk-produk pertanian yang dihasilkannya ke OKKPD Dinas Ketahanan Pangan. Jadi ada beberapa manfaat yang akan diperoleh petani yang mau mengurus pendaftaran PSAT.

Pertama, petani yang mendaftarkan produknya akan diproses terlebih dahulu oleh OKKPD sesuai prosedur yang berlaku.

Kemudian apabila produk milik petani masih belum memenuhi syarat, seperti masih terdapat pestisida atau campuran logam berat efek penanganan pasca panen.

Maka OKKPD akan menunda pemberian izin edar dan memberitahukan kepada petani tentang kualitas produknya, serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan petani untuk memperbaiki kualitas produknya.

"Jadi, petani mendapatkan pembinaan tentang standarisasi minimal kualitas produk yang bisa beredar luas di masyarakat," tuturnya.

Kemudian dari sisi manfaat yaitu, kualitas produk pertanian teruji. Meskipun petani telah yakin akan kualitas produknya, masyarakat atau konsumen tidak selalu percaya begitu saja.

Dengan menunjukkan surat izin edar yang telah diterbitkan oleh OKKPD, petani dapat menunjukkan bukti bahwa produk pertaniannya telah teruji, terjamin, bermutu serta keamanannya.

Ketiga, legalisasi dalam penjualan produk pertanian, keempat, berpotensi dijual skala nasional bila kualitas, kuantitas, dan harga memungkinkan dan kelima dapat meningkatkan nilai jual.

Saya himbau agar petani yang punya penggilingan gabah beras dan mempunyai kemasan harap bisa mendaftarkan ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. "Karena kalau ada registrasi edar maka produk tersebut telah dipastikan layak di konsumsi masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui Dinas Ketahanan Pangan Kalsel selalu melakukan pengawasan pangan segar maupun bahan pokok di pasar tradisional yang ada di Kabupaten/Kota untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman. (MC Kalsel/tgh/ARH/toeb)



Pastikan Stok Aman Jelang Lebaran, Kementan Pantau Langsung Panen Cabai di Temanggung

Senin, 10 Mei 2021 – 22:35 WIB



- JPNN.com Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto saat meninjau panen cabai di Temanggung, Jateng. Foto: Ditjen Hortikultura Kementan. jpnn.com, TEMANGGUNG

- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan stok pangan mencukupi kebutuhan konsumen menjelang Lebaran Idulfitri 2021. Terlebih dengan adanya kebijakan larangan mudik, pasokan pangan di Jabodetabek harus dipastikan aman dan harganya terkendali. Kementerian Pertanian (Kementan) juga turun langsung ke lapangan memantau kondisi daerah sentra pemasok cabai Jabodetabek, di antaranya di Desa Campursari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Baca Juga: Kunjungi RPH, Kementan Pastikan Ketersediaan Daging Sapi Aman untuk Lebaran Di daerah itu terhampar kebun cabai seluas 120 hektare dan di Desa Kataan seluas 250 hektare yang mayoritas sedang panen. Bila ditotal, satu Kecamatan Ngadirejo memiliki tanaman cabai rawit seluas 450 hektare, cabai keriting 30 hektare, dan cabai besar 250 hektare.

Melihat kondisi tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto optimis pasokan cabai mencukupi kebutuhan Idulfitri yang jatuh di hari Kamis mendatang. "Jika melihat kondisi di wilayah sentra seperti ini, Saya rasa tidak akan terjadi lonjakan harga cabai. Paling terjadi distorsi harga, itu pun karena suasana lebaran, supir angkutan, pedagang dan juga petani



tentunya merayakan Idulfitri bersama keluarga, setelah itu harga tetap aman," ujar Prihasto dalam keterangannya, Senin (10/5). jika dilihat dari data prognosa produksi yang dihitung berdasarkan realisasi luas tambah tanam bulan November 2020 - Februari 2021, produksi cabai rawit bulan Mei sebesar 101.132 ton. Sedangkan kebutuhan hanya 76.726 ton. Dengan demikian, kata Prihasto, masih terdapat surplus sebesar 24.407 ton. Begitu juga dengan cabai besar, prognosa produksi sebesar 97.456 ton sedangkan kebutuhan 79.711 ton sehingga surplus sebesar 17.754 ton.

Di sela-sela kunjungan lapangannya, Anton -panggilan Prihasto Setyanto- juga menyampaikan apresiasinya kepada petani Temanggung yang sudah menerapkan likat kuning dan perangkap lalat buah di pertanaman cabai.

Begini Reaksi Jokowi "Lalat buah itu yang paling ditakuti tanaman hortikultura. Jadi, dengan adanya petrogenol ini tentunya sangat efektif untuk menangkal serangan hama. Saya sarankan kepada petani di daerah lain juga menggunakan ini", pungkas Anton.

Ketua kelompok Sidodadi Yasmadi menyampaikan Kabupaten Temanggung siap untuk mengamankan pasokan cabai hingga Idulfitri nanti. Menurut dia, petani di wilayahnya akan tetap panen cabai hingga hari selasa untuk memenuhi pasokan di pasar setempat dan juga Jabodetabek. "Selasa masih petik, dikirim ke Jakarta Selasa malam, hari Rabu pagi sampai Jakarta.

Tenaga petik liburanya juga cuma dua hari. Jadi, lebaran hari kedua sudah petik lagi," ucap Yasmadi. Sarmadi selaku ketua kelompok Muda Sejahtera yang rata-rata anggotanya masih muda, saat ini sedang panen cabai rawit seluas 25 hektare dan siap memasok kebutuhan Jabodetabek. Dia juga menyampaikan bahwa petani sebenarnya tidak menginginkan harga sangat tinggi. "Harga di kisaran 20 ribu hingga 30 ribu di tingkat petani sudah sangat menguntungkan," kata Sarmadi.

Kelompok Tani Muda Sejahtera berharap dapat menanam cabai sepanjang musim. Selama ini pertanaman cabai hanya dilakukan pada musim hujan saja. Jika kemarau perlu adanya fasilitasi pompa air agar tetap bisa tanam. Namun disisi lain, kelompok tani ini yang diprakarsai oleh para milenial di Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo telah menerapkan pengendalian OPT ramah lingkungan pada pertanaman cabai rawitnya. Pengaplikasian petrogenol dan PGPR diakui Sarmadi lebih hemat biaya karena mampu menekan penggunaan pestisida.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah pusat. Tahun 2020 daerahnya mendapatkan alokasi pengembangan kawasan cabai dan bantuan benih dari Ditjen Hortikultura seluas 82 hektare yang telah tertanam pada bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. "Tahun ini juga mendapatkan alokasi seluas 30 hektare. Bantuan tersebut sangat membantu petani, terlebih di masa pandemi covid tahun kemarin, sangat menolong permodalan petani untuk tetap bisa tanam cabai," pungkas Joko (*/jpnn)



Penuhi Kebutuhan Pangan Dari Pekarangan

Selasa, 11 Mei 2021 | 12:13 WIB | Penulis

MC Kab Aceh Tengah

, Redaktur Kusnadi



*Oleh : Fathan Muhammad Taufiq *)*

Salah satu aspek ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu yang sangat krusial hampir di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang, adalah masalah ketersediaan pangan. Beruntung kita tinggal di Indonesia di mana masih sangat banyak potensi sumber daya alam untuk pengembangan ketersediaan pangan ini, namun masih perlu upaya dan kerja keras agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan setiap individu, dimulai dari ketersediaan pangan keluarga, dimana setiap keluarga harus mampu menyediakan pangan bagi anggota keluarga dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam keluarga tersebut. Kedepan,



setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, termasuk potensi lahan pekarangan dalam menyediakan pangan bagi keluarga.

Optimalisasi lahan pekarangan melalui Pekarangan Pangan Lestari

Untuk merangsang pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu penyedia pangan keluarga, sejak tahun 2020 yang lalu, Kementerian Pertanian telah menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep *Pekarangan Pangan Lestari (P2L)*. Program ini adalah kelanjutan dari program Rumah Pangan Lestari (RPL) yang sudah diluncurkan pada tahun 2011 yang lalu, inti programnya masih sama, namun dengan penekanan pada optimalisasi dan intensifikasi, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Program P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan lahan pekarangan secara intensif sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta meningkatkan pendapatan keluarga. Secara sederhana, konsep ini adalah upaya mengoptimalkan dan mengintensifkan pemanfaatan lahan di sekitar rumah atau fasilitas umum yang belum digarap optimal dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Apabila P2L dikembangkan dalam skala luas, berbasis desa atau wilayah pemukiman lain yang memungkinkan, penerapan prinsip Pekarangan Pangan Lestari akan berkembang menjadi *Kawasan Pekarangan Pangan Lestari (KP2L)*. Selain memanfaatkan pekarangan rumah keluarga sebagai basis rumah pangan lestari, KP2L juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Konsep KP2L yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian memiliki prinsip optimalisasi lahan yang selama ini nyaris tidak dimanfaatkan untuk penyediaan pangan keluarga dan masyarakat, secara umum KP2L memiliki prinsip utama yaitu :

1. Pemanfaatan pekarangan rumah dan fasilitas umum yang memungkinkan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan,
2. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal,
3. Konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan)
4. Menjaga kelestarian plasma nutfah spesifik lokasi melalui kebun bibit desa
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena konsep KP2L ini berbasis keluarga, maka pelaku utama dari program ini adalah seluruh anggota keluarga. Namun demikian karena lingkup kegiatan ini berada di sekitar rumah atau tempat kediaman keluarga, maka kegiatan ini lebih diarahkan bagi kaum perempuan (ibu rumah tangga) agar mereka lebih produktif dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan, para perempuan itu kemudian disarankan untuk membentuk *Kelompok Wanita Tani (KWT)*. Meski demikian kegiatan ini juga tidak menutup kemungkinan melibatkan kaum pria, khususnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berat bagi perempuan seperti membuat kandang ternak, memasang



pagar, menggali kolam ikan, mengangkat pupuk, mengangkut hasil panen dan sebagainya. Sementara kegiatan “*reguler*” seperti menanam, menyiangi tanaman, memupuk, menyiram dan memanen dapat dilakukan oleh para perempuan.

Untuk menjaga keberlanjutan dan mendapatkan nilai ekonomi dari KP2L, pemanfaatan pekarangan diintegrasikan dengan unit pengolahan dan pemasaran produk. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan hasil yang melimpah dan peningkatan nilai tambah produk.

Sedangkan dampak yang diharapkan dari pengembangan KP2L ini antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari.
2. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), ternak dan ikan, serta pengolahan hasil dan limbah rumah tangga menjadi kompos.
3. Terjaganya kelestarian dan keberagaman sumber pangan lokal.
4. Berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga untuk menopang kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan lestari dan sehat.

Pemilihan Komoditas

Komoditas yang akan dikembangkan melalui penerapan konsep KRPL harus disesuaikan dengan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, berbasis sumber pangan lokal, dan bernilai ekonomi. Artinya komoditi yang akan dikembangkan dalam KRPL tersebut memang komoditi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga, berbasis sumberdaya pangan lokal yang sudah dikenal secara turun temurun di daerah tersebut, serta memiliki nilai ekonomis, artinya jika hasil yang didapatkan melebihi kebutuhan keluarga, kelebihan hasil tersebut dapat dijual untuk menambah penghasilan keluarga.

Untuk itulah, Kementerian Pertanian telah merekomendasikan beberapa komoditi yang sesuai untuk pengembangan KP2L ini. Komoditas tersebut antara lain sayuran, tanaman rempah dan obat, buah-buahan (pepaya, belimbing, jambu biji, srikaya, sirsak, dan buah lainnya, disesuaikan dengan lokasi), dan pangan lokal (ubi jalar, ubi kayu, ganyong, garut, talas, suweg, ubi kelapa, gembili, labu kuning, dan pangan lokal lainnya).

Pada pekarangan Strata 2 dan 3 yang memiliki areal yang lebih luas, pengembangan KP2L juga dapat ditambahkan dengan budidaya ikan dalam kolam dan ternak unggas atau ternak lainnya. Sesuai dengan kondisi lahan, agroklimat dan kesesuaian lahan, maka tiap kawasan menentukan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan secara komersial, bisa saja antara satu daerah dengan daerah lainnya, komoditi yang dikembangkan berbeda-beda, sesuai dengan spesifikasi dan kerajinan lokal setempat..

Konsepsi Lestari



Disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari, karena pengembangan KP2L memang mengandung konsep lestari, artinya pemanfaatan sumberdaya pekarangan ini dilakukan secara berkesinamungan atau terus menerus, karena kebutuhan pangan bagi keluarga juga berlaku secara terus menerus. Meski dilakukan secara terus menerus, namun komoditi yang dikembangkan bisa saja berubah atau berganti disesuaikan dengan musim atau kondisi iklim setempat.

Agar konsep KP2L ini terus lestari, para petugas lapangan setempat dan ketua kelompok agar sejak awal dilibatkan secara aktif mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Diharapkan keterlibatan ini akan memudahkan proses keberlanjutan dan kemandiriannya.

Secara program, pengembangan awal KP2L ini memang difasilitasi oleh pemerintah melalui pemberian stimulant berupa bibit, pupuk, obat-obatan, sarana dan prasarana pendukung dan bantuan teknis berupa pelatihan. Namun untuk selanjutnya, diharapkan setiap keluarga dapat melanjutkan kegiatan ini secara mandiri, karena hasil yang diperoleh dari kegiatan ini juga untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka sendiri.

Beberapa faktor lain yang mendukung keberlanjutan KP2L adalah ketersediaan benih/bibit, penanganan pascapanen dan pengolahan, dan pasar bagi produk yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan penumbuhan dan penguatan kelembagaan Kebun Bibit Desa (KBD), unit pengolahan hasil pertanian, dan kemudahan akses pemasaran. Selanjutnya, untuk mewujudkan kemandirian kawasan, maka dilakukan pengaturan pola dan rotasi tanaman termasuk sistem integrasi tanaman dengan ternak.

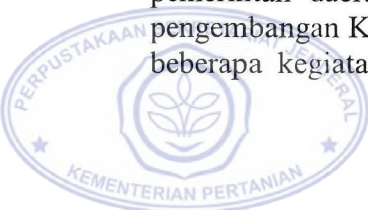
Sementara pada tingkat lanjut, KP2L juga ditujukan untuk pemenuhan Pola Pangan Harapan, dan untuk memenuhi Pola Pangan Harapan, diperlukan model diversifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok pangan (padi-padian, aneka umbi, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lainnya) bagi keluarga. Melalui model lanjutan pengembangan KRPL ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan Pengembangan KP2L

Sebagai program yang baru diperkenalkan kepada masyarakat, tentunya pengembangan KP2L juga harus melalui tahapan-tahapan, mulai dari sosialisasi, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, penyediaan kebun bibit desa dan kebun percontohan. Sedang pada tahap lanjutan, dapat ditampah dengan unit pengolahan hasil dan pemasaran..

1. Sosialisasi dan Pelatihan

Untuk memperkenalkan program KP2L ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan. Sosialisasi dilakukan oleh tim kepada warga di suatu kawasan perdesaan/perkotaan dengan melibatkan pemerintah daerah, penyuluh, tokoh masyarakat, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengembangan KP2L serta membuat perencanaan kegiatan. Sosialisasi dan pelatihan ini meliputi beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan bagi pendamping (Training of Trainers), Pelatihan



teknis bagi peserta, serta pembinaan lanjutan oleh para penyuluh pertanian dan stake holders terkait .

Pelatihan dilaksanakan untuk membekali warga tentang teknologi yang akan diterapkan pada kawasan. Pelatihan meliputi teknik budidaya tanaman, perbenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran sampai dengan pengelolaan limbah.

2. *Penyiapan Lahan dan Media Tanam*

Antusiasme dan partisipasi warga saat penyiapan lahan di pekarangan, media tanam, kelengkapan vertikultur, sangat menentukan keberhasilan program. Penyiapan media dan wadah tanaman menggunakan bahan baku lokal seperti bambu, wadah dari barang/kemasan bekas pakai, dilakukan oleh warga dengan bimbingan para penyuluh. Penyipana media tanam vertikultur bukanlah kebutuhan mutlak, karena hanya dibutuhkan pada kawasan yang lahan pekarangannya sangat sempit, tapi untuk kawasan dengan areal pekarangan yang luas, budidaya dapat dilakukan langsung pada lahan pekarangan, bahkan dapat dipadukan dengan konsep integrasi tanaman, ternak dan ikan.

3. *Perawatan Tanaman dan pemeliharaan komoditi*

Perawatan tanaman secara rutin oleh warga dengan penyiangan, penyiraman, pemberian pupuk kandang, pemasangan ajir untuk penopang tanaman, pemeriksaan dan pengendalian hama/penyakit tanaman. Sementara pada pemeliharaan ayam/ternak atau ikan, pemeliharaan dilakukan dengan pemberian vaksin dan pemeriksaan kesehatan ternak secara berkala, pemberian pakan secara berimbang dan pemeriksaan kebersihan dan sanitasi kandang. Dalam fase perawatan dan pemeliharaan ini, para peserta akan terus mendapatkan pendampingan dan pembinaan oleh para penyuluh dan stakeholders terkait

4. *Pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD) dan Kebun Percontohan*

Konsepsi lestari yang diusung oleh program KP2L, mengharuskan setiap desa memiliki Kebun Bibit Desa (KBD), keberadaan kebun bibit ini adalah untuk menjaga kesinambungan program pemanfaatan pekarangan ini. Kenapa setiap desa harus memiliki KBD?, karena setiap daerah atau kawasan memiliki spesifikasi komoditi, sehingga kebutuhan bibit yang diperlukan oleh masyarakat juga harus dibuat di desa atau kawasan tersebut, karena bibit yang dikembangkan di daerah sendiri tentu sudah memiliki daya adaptasi yang baik, sehingga dapat memperkecil terjadinya gagal tanam dan gagal panen.

Boleh dibilang KBD merupakan jantung KP2L, karena bisa menjadi tempat produksi benih dan bibit untuk RPL dan kawasannya. Keberadaan KBD juga bisa menjadi asset desa atau kelompok tani karena benih/bibit hasil produksi kebun bibit ini dijual untuk masyarakat dan hasilnya bisa mengisi kas desa/kelompok tani yang bisa dinfaatkan untuk pengembangan dan penguatan klembagaan kelompok tani itu sendiri.

Selain kebun bibit, program KP2L juga menghendaki adanya Kebun Percontohan, keberadaan kebun percontohan ini sangat penting untuk menjadi contoh dan acuan dalam penerapan konsep



budidaya di KP2L. Kebun percontohan juga bisa menjadi wahana pembelajaran bagi warga sekaligus konservasi sumber daya genetik untuk melindungi dan melestarikan plasma nutfah spesifik lokasi atau kawasan tersebut. Karena sifatnya sebagai percontohan atau acuan bagi warga, maka Kebun Percontohan harus dikelola dengan baik, sedangkan pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama antara penyuluh pertanian, KWT, PKK desa dan stake holders terkait lainnya.

Selanjutnya ketika program KP2L ini telah berhasil, dan produk yang dihasilkan dari pekarangan keluarga ini melebihi kebutuhan pangan keluarga, maka kelebihan hasil ini dapat dijual atau dipasarkan, baik di lingkungan desa maupun keluar desa. Hasil penjualan produk pertanian asal pekarangan ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini berarti program KP2L juga memiliki manfaat ganda, yaitu sebagai penyedia pangan keluarga sekaligus pendongkrak perekonomian keluarga.

Sementara untuk penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan hasil pertanian menjadi kuncinya. Satu jenis komoditi, misalnya ubi kayu, dapat diolah menjadi berbagai jenis pangan olahan dengan performa dan rasa berbeda. Dengan sedikit keterampilan mengolah bahan pangan, ubi kayu dapat disajikan sebagai keripik, kerupuk ubi, tape, kue talam, lemet/lepat, tiwul, getuk dan sebagainya. Produk pertanian yang sudah diolah sedemikian rupa, tentu nilai jualnya juga akan lebih tinggi, jadi usaha pengolahan hasil ini juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatn keluarga. Dan untuk bisa mengolah berbagai produk pangan hasil dari pekarangan ini, dapat dilakukan melalui pelatihan atau simulasi yang difasilitasi oleh desa serta penyuluh yang bertugas di desa tersebut..

Selama ini kita mungkin beranggapan, bahwa keberadaan pekarangan hanyalah sebagai pelengkap sebuah rumah, namun ternyata jika dioptimalkan pemanfaatannya, pekarangan rumah yang tidak luas pun dapat menjadi penyedia pangan keluarga, bahkan dapat menstimulasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan KP2L adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan tersebut. Kemauan masyarakat serta dukungan dari pemerintah daerah, tentu saja akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Semoga catatan kecil ini bisa menjadi masukan bagi instansi dan stakeholders yang terkait dengan pembinaan ketahanan pangan di daerah, dan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk kegiatan produktif.



Pergerakan Harga Bahan Pokok Masuki Fase Puncak

Senin, 10 Mei 2021 07:22 WIB

Redaksi AyoBandung.Com

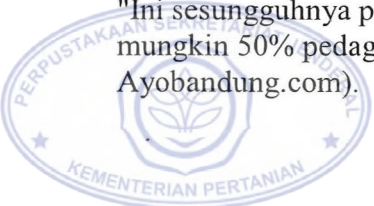


Permintaan masyarakat terpantau melonjak signifikan untuk mempersiapkan kebutuhan perayaan Lebaran. Seiring kenaikan permintaan, harga pun ikut terkerek naik. (dok. Humas Setda Kota Bandung)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyampaikan, pergerakan harga bahan pangan pokok telah memasuki masa puncak. Permintaan masyarakat terpantau melonjak signifikan untuk mempersiapkan kebutuhan perayaan Lebaran. Seiring kenaikan permintaan, harga pun ikut terkerek naik.

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, puncak permintaan yang diikuti kenaikan harga akhir pekan ini karena pada H-2 dan H-1 Lebaran, pedagang mulai berkurang sehingga stok yang tersedia di pasar menurun.

"Ini sesungguhnya puncak jadi (harga) beberapa komoditas cukup tinggi. Mendekati Lebaran mungkin 50% pedagang yang masih berjualan," kata Mansuri dinukil dari Republika (jaringan Ayobandung.com).



Ia menyebut, harga pangan yang mengalami kenaikan yakni daging sapi, daging ayam, minyak goreng, aneka cabai, bawang merah dan bawang putih, gula, serta beras. Ikappi mencatat, harga daging sapi lokal dan impor rata-rata dari Rp120.000 per kilogram (kg) naik menjadi Rp140.000 per kg.

Daging ayam naik dari Rp33.000 per kg menjadi Rp40.000 per kg. Harga minyak goreng juga relatif cukup tinggi yakni hingga Rp16.000 per kg. Selanjutnya, cabai rawit merah dari Rp60.000 per kg menjadi Rp70.000 per kg, cabai merah besar dari Rp30.000 per kg menjadi Rp40.000 per kg, serta cabai keriting yang dihargai Rp40.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kg.

Ikappi meminta pemerintah tetap menjaga kelancaran distribusi pangan setelah periode Ramadan dan Lebaran. Ia berharap, kebijakan larangan mudik dan penyekatan antardaerah tidak menghambat distribusi pangan.

"Kami khawatir ini mempengaruhi distribusi seperti dari sentra produksi ke Jakarta. Ini yang harus dipikirkan," kata dia.

Meski begitu, ia menilai, saat ini kebijakan larangan mudik belum berdampak terhadap kelancaran pengiriman bahan pangan. Para pedagang di pasar juga fokus untuk menghabiskan stok yang masih tersedia kepada para konsumen.

Sementara itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan menyoroti situasi pergerakan harga komoditas daging sapi dan daging ayam. Kedua komoditas tersebut tengah mengalami kenaikan harga signifikan di tingkat konsumen.

"Kita tentu memberikan perhatian terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis. Perhatian utama ke pasokan dan harga daging sapi dan daging ayam," kata Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat, harga daging ayam ras segar secara rata-rata nasional hingga akhir pekan ini sebesar Rp37.000 per kilogram (kg) atau naik 1,09%. Sementara, daging sapi kualitas I dihargai Rp128.000 per kg, naik 0,43 persen.

Risfaheri menjelaskan, ketersediaan daging sapi saat ini dalam level cukup. Sementara, permintaan menjelang Idulfitri cukup meningkat. Menurutnya, dengan situasi itu dipasikan akan mendongkrak harga hingga ke tingkat hilir. Situasi itu terutama dimanfaatkan oleh pemasok daging sapi atau perusahaan penggemukan sapi.

"Harga sapi hidup dari feedloter mengalami kenaikan sehingga harga jual tentu mengalami kenaikan meskipun pemantauan kami masih dalam batas kewajaran," kata Risfaheri.

Untuk daging ayam, ia mengatakan, seharusnya tidak mengalami kenaikan karena pasokan lebih dari cukup. Risfaheri mengklaim, berdasarkan prognosis neraca produksi daging ayam nasional mengalami surplus besar.



Namun, beberapa rumah potong ayam (RPA) beralasan harga ayam hidup dari peternak sudah mengalami peningkatan. Terdapat kenaikan harga bibit ayam atau day old chick (doc) serta harga jagung untuk pakan yang meningkat.

Risfaheri menuturkan, BKP melalui pasar mitra tani khususnya di Jabodetabek gencar melakukan pasar murah, termasuk untuk daging sapi dan daging ayam beku. "Pembelian daging sapi beku khususnya mengalami kenaikan tajam baik melalui online maupun offline," ujarnya.





**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**